

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DISKOMINFO KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Fazli Hilmy Pradana

NPP. 29.1974

*Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: fazlihilmy22@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background : An electronic-based government policy, e-government began with the 2003 Presidential Instruction and was implemented in national and local government organizations. The use of information and communication technology is used by the Bulungan Regency Government in various forms of digital-based governance. The problem under study is how the application of digital publik service information is applied in the Communication and Information Office of Bulungan Regency. **Purpose:** This study is aimed at identifying the application of e-government as a public information service at Diskominfo, Bulungan Regency, North Kalimantan Province . **Method:** The method used in this paper is a descriptive method with an inductive approach. **Result:** The results of the study show that the policy of digitizing the delivery of publik information has been implemented with various advantages and disadvantages. The support dimension shows that the policy is based on regulations, bureaucratic structure and the active participation of Bulungan Regency to implement this policy. The capacity dimension still shows a lack of support from experts in the IT field, budget and publik awareness which is still low. The value dimension shows that digitalbased publik information services provide benefits to the government by facilitating the delivery of information to the publik. **Conclusion:** Of the three dimensions studied, only two dimensions meet the indicators of successful implementation of e-government according to Indrajit's e-government theory, namely the support dimension and the value dimension. The need for improvement of these three dimensions, especially the value dimension, so that the benefits of implementing e-government in public information services run optimally/ **Keywords:** digital-based government, publik information, capacity, support, values

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Kebijakan pemerintahan berbasis elektronik, e-government dimulai dengan Instruksi Presiden tahun 2003 dan diterapkan di organisasi pemerintah nasional dan daerah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam berbagai bentuk

penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan informasi pelayanan publik digital diterapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan. **Tujuan:** Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan *e-government* sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan digitalisasi penyampaian informasi publik telah dilaksanakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Dimensi *support* memperlihatkan bahwa kebijakan didasari oleh peraturan, struktur birokrasi dan partisipasi aktif Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan kebijakan ini. Dimensi *capacity* masih memperlihatkan kekurangan dari dukungan tenaga ahli di bidang IT, anggaran dan keperdulian masyarakat yang masih rendah. Dimensi *value* memperlihatkan bahwa pelayanan informasi publik berbasis digital memberi manfaat kepada pemerintah dengan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat. **Kesimpulan :** Dari tiga dimensi yang diteliti, hanya dua dimensi yang memenuhi indikator keberhasilan penerapan *e-government* menurut teori *e-government* oleh Indrajit yaitu dimensi *support* dan dimensi *value*. Perlunya peningkatan dari tiga dimensi tersebut terutama dimensi *value* agar manfaat penerapan *e-government* dalam pelayanan informasi publik berjalan dengan maksimal
Kata Kunci : Pemerintahan berbasis digital, Informasi publik ,kapasitas, dukungan, nilai

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi berkembang seiring perkembangan manusia, teknologi bahkan sudah ada sejak zaman prasejarah. Teknologi manusia purba bisa dilihat dari cara berkomunikasi melalui gambar sebagai penyampaian informasi di dinding . Perkembangan teknologi kemudian berevolusi seiring dengan evolusi manusia. Manusia sudah mulai berkembang diikuti oleh perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat ini sangat membantu manusia di setiap bidang yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan manusia sudah tidak mengenal batasan seperti jarak dan waktu. Orang yang jauh sekarang sudah bisa terasa dekat dan mampu menampilkan secara visual maupun dalam bentuk wujud, berkat perkembangan dari teknologi elektronik dan internet.

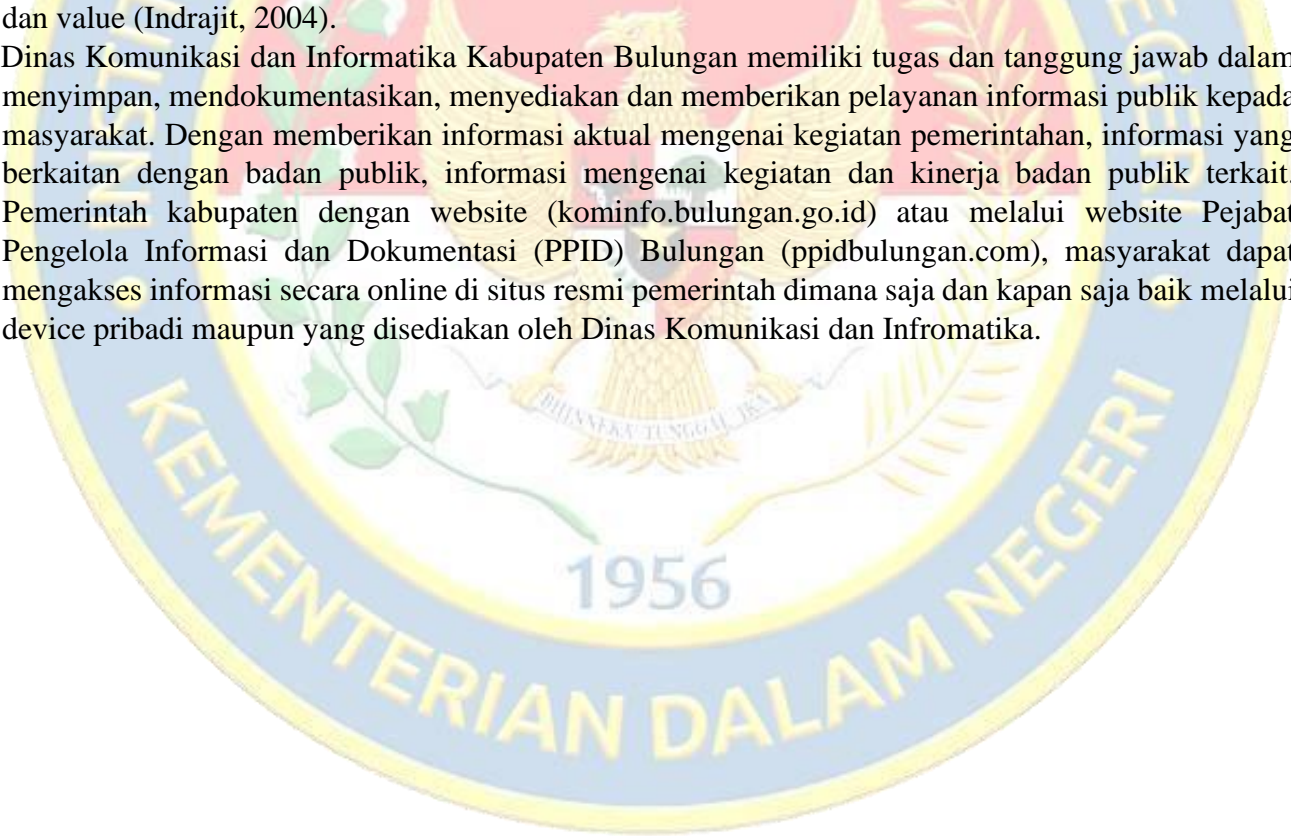
Teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat, dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan sosial, bahkan dalam organisasi/perusahaan. Teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam tatanan sosial budaya baru yang yang menyebabkan pergeseran dari media cetak ke media elektronik (Marshall, 1964). *E-governmance* merupakan sebuah bentuk media komunikasi (Marshall, 1964). Media menggunakan jangkauan yang dimilikinya akan memperluas hal-hal dalam diri manusia dan membuka ruang dan waktu (Nurina Aprilia, Fefta Wijaya, & Suryadi, 2014). *E-Government* disebutkan memberi keuntungan secara parallel, menaikkan efisiensi organisasi pemerintahan sekaligus memberi manfaat pada rakyat sebagai penerima layanan (Axelsson et al., 2013)

Pemerintah menerapkan sistem *e-government*-melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003. Pemerintah memerintahkan lembaga pemerintahan level nasional dan daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk menerapkan *e-government* (Instruksi Presiden, 2003). Produk *e-government* yang dikembangkan oleh pemerintah daerah akan berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi masing-masing daerah yang sangat berbeda. Variasi produk

eGovernment daerah dapat dilihat dari perbedaan:—platform, target pengguna ataupun maksud pembuatan. Aplikasi dan Web adalah salah satu contoh dari produk *E-Government* tersebut. penerapan *e-government* sebagai teknologi informasi membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih reaktif, efektif, efisien dan bertanggung jawab (Hutabarat 2017). Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* yang baik dan dalam rangka percepatan pelaksanaan pemerintahan daerah sendiri, pengembangan dan implementasi *e-government* merupakan alternatif strategis untuk mengkomunikasikan informasi dua arah antara pemerintah dan Masyarakat serta dunia usaha di seluruh dunia dan antara pemerintah itu sendiri. Hal ini mengatasi permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah, yaitu terbatasnya infrastruktur dan struktur komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat, pusat dan daerah kepada masyarakat (Hardiansyah, 2011).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendala penerapan *e-government* disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konflik antara kebijakan, peraturan yang masih kurang mendukung, alokasi anggaran yang kurang memadai, pembakuan sistem yang tidak jelas, serta komitmen dari para pemimpin atau pejabat (Kumorotomo, 2014).Kunci sukses *e-government* terletak pada pembagian tanggung jawab diantara stakeholders yang memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda (Wargadinata, 2021). Selain stakeholder, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh dalam pengembangan *e-goverment*. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah support, capacity dan value (Indrajit, 2004).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi aktual mengenai kegiatan pemerintahan, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. Pemerintah kabupaten dengan website (kominfo.bulungan.go.id) atau melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bulungan (ppidbulungan.com), masyarakat dapat mengakses informasi secara online di situs resmi pemerintah dimana saja dan kapan saja baik melalui device pribadi maupun yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 1.1 Website Diskominfo Kabupaten Bulungan



Sumber : <http://diskominfo.bulungan.go.id/wp/>

Melalui website tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan memberikan berbagai informasi aktual. Beberapa informasi publik yang dapat di akses diantaranya adalah informasi mengenai kegiatan pemerintahan, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui website tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan memberikan berbagai informasi aktual. Beberapa informasi publik yang dapat di akses diantaranya adalah informasi mengenai kegiatan pemerintahan, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2 Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan



Sumber : <https://ppidbulungan.com/>

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui website, masyarakat/pemohon informasi cukup membuka website resmi Pemerintah Kabupaten Bulungan, Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bulungan atau website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan. Kemudian mengklik ikon informasi publik pada website tersebut lalu pemohon informasi dapat langsung memilih informasi yang diperlukan. Informasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu pertama informasi berkala; kedua informasi serta merta dan ketiga informasi setiap saat.

Bentuk layanan Informasi yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan selain berbentuk website , ada juga dalam berbentuk aplikasi android yang dapat diunduh gratis di Playstore, aplikasi tersebut adalah Pantau Pelayanan Publik Kabupaten Bulungan. Aplikasi Pantau Bulungan adalah solusi bagi masyarakat untuk dapat informasi pemerintahan secara terbuka dan transparansi berbasis android

Gambar 1. 3 Aplikasi Pantau Pelayanan Publik Kabupaten Bulungan



Sumber : Aplikasi Android Pantau Bulungan

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui kebutuhan masyarakat melalui media ini. Fasilitas ini juga merupakan tindakan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan

menjadi acuan bagi pengembangan standar pelayanan khususnya pelayanan informasi publik di masa yang akan datang. Pelayanan informasi publik berbasis digital masih memiliki berbagai kendala. Masalah yang dihadapi seperti: kurangnya operator yang profesional, sarana dan prasana yang masih kurang maksimal, dan masyarakat masih kurang paham dalam penggunaan media sosial untuk informasi publik (Misnawati dan Heru Setiawan, 2021; Syamsiah Amali, 2016). Masyarakat masih mengeluh kesulitan untuk masuk ke dalam aplikasi, lambatnya server, sampai lemahnya sosialisasi aplikasi (Marcello, dkk, 2020; Alif, Warson, 2019)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Penerapan E-Government Sebagai Pelayanan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Faktor Regulasi merupakan salah satunya. Pemerintah sendiri sudah membuat regulasi yang berkaitan dengan yang namanya *E-Government*. Intruksi Presiden Tahun 2003 merupakan awalan dalam penerapan *e-government* di Indonesia sampai dengan regulasi yang di buat menyesuaikan kondisi daerah masing-masing seperti peraturan Bupati Bulungan No 34 Tahun 2018 tentang pedoman pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bulungan. Namun dalam penerapannya masih berjalan dengan maksimal

Faktor yang menjadi masalah lainnya yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur jaringan yang belum optimal. Ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten, dukungan anggaran yang membatasi pelaksanaan program serta kepedulian masyarakat yang masih rendah

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang terlebih dahulu telah mengangkat permasalahan berdasarkan pada seputar pelayanan informasi publik berbasis e-government. Berikut merupakan hasil dari penelitian sebelumnya agar sebagai pembanding antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti melihat beberapa kesamaan dan perbedaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Misnawati dan Setiawan 2021, terdapat kesamaan berupa pelayanan informasi publik berbasis elektronik di Diskominfo. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aplikasi PPID di Kabupaten Tanjung Jabung belum efektif dan masih perlunya peningkatan lebih lanjut.

Aditya Marcello, dkk 2020 membahas tentang optimalisasi informasi aplikasi sitasya (system pemantauan masyarakat) sebagai pelayanan publik di kota manado. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pihak diskominfo manado sudah mengoptimalkan aplikasi sitasya tersebut, tetapi masih mendapatkan keluhan dari masyarakat, seperti lambatnya masuk ke dalam aplikasi.

Syamsiah Amali 2016 membahas “Kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di Diskominfo kota Bitung masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari sumber daya manusia sampai sarana dan prasarana.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif dan Warsono 2019 tentang “ Analisis Pengembangan e-government untuk Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah “ mengungkapkan bahwa, Pengembangan e-government dalam penyediaan akses informasi ini, masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya keunagan dan kurangnya sosialisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Noveriyanto,dkk 2018 membahas tentang “e-government sebagai layanan komunikasi pemerintah kota surabaya “. Penelitian ini menunjukkan e-government yang dilakukan di kota surabaya telah di capai dengan maksimal menggunakan pengukuran dimensi PeGI. Menyebabkan e-government antara pemerintah dan masyarakat telah di implementasikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penerapan E-Government Sebagai Pelayanan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dimana masih belum banyak diteliti oleh orang lain dan saya juga tertarik untuk meneliti lebih lanjut. , Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif . Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori *E-Government* yang dikutip Indrajit dalam bukunya “ *Electronic Government* ” yang meliputi: (1) Support merupakan kebijakan yang telah disepakati oleh pemegang kekuasaan publik dan dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. (2) Capparency yaitu yakni Human Resorce (SDM), sumber daya anggaran, dan sumber daya fisik yang dapat mendukung kelancaraan pelaksanaan suatu program. (3) Value adalah akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari nilai atau kuantitas manfaat yang didapatkan. Kebijakan e-government tentunya memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku sebagai pelaksana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi penerapan E-Government sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif, yaitu memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan atau kasus yang didasari oleh fakta yang ada dengan berpedoman pada fakta yang bersifat khusus setelah itu menjawab permasalahannya kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan e-government sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan

Sumber data yang dipakai oleh peneliti dibagi menjadi 2 macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh para peneliti dan sumber primer atau aslinya. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai macam sumber

yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data-data dimana peneliti memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait Informan yang di ambil oleh peneliti adalah orang-orang yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan objek yang di teliti . Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Diskominfo Kabupaten Bulungan. Yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika , Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik ,Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik ,Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media ,Kepala Seksi Layanan Pengelolaan Aplikasi Komunikasi dan Informasi masing-masing 1 orang, dan Masyarakat 7 orang Peneliti disini menggunakan teknik penelitian melalui observasi , wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan teknik analisa data, peneliti menggunakan analisis data dengan Model MiEs dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), yang di bagi menjadi beberapa tahap yaitu , *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau verifikasi)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis menurut tujuan penelitian yang ingin di peroleh dalam tempat penelitian, berikut merupakan hasil analisis dari data dan fakta yang ada di lapangan dengan prespektif legalistik dan Teoretis yang akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi penerapan E-Government sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan teori *E-Government* yang dikutip Indrajit dalam bukunya “ *Electronic Government* ” yang meliputi dari *Support, Capacity, dan Value*

3.1. Support

3.1.1 Aturan dan Kebijakan Pemerintah

Pengembangan *e-government* diperlukan aspek penting yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pengembangan *e-government* yaitu standar yang telah disepakati oleh pemegang kekuasaan publik dan dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.

Kebijakan yang mendasari pembangunan e-government tersebut di mulai dari UUD 1945 pasal 28F yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi sampai terbentuknya kebijakan e-government sesuai dengan daerah masing-masing seperti kebijakan yang dirumuskan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan kedalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Dalam regulasi tersebut di jelaskan seputar aturan yang mengatur PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), Informasi yang dibatasi , dan beberapa hal lainnya. Penerapan kebijakan e-government tersebut sudah di buat dan di jalankan, namun masih kurang maksimal dalam penerapannya

3.1.2 Partisipasi Pemerintahan

Diskominfo Kabupaten Bulungan dalam menerapkan e-government dalam pelayanan informasi publik, tentu di dukung oleh pihak pemerintah Kabupaten Bulungan. Dapat terlihat dari adanya kesepakatan dalam membentuk e-government yang menghasilkan regulasi hukum yang mengatur seputar e-government dalam pelayanan informasi publik, sumber daya yang mendukung mensukseskan konsep e-governmet tersebut, dan penerapannya

Diskominfo memiliki yang namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan yang di atur dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan OPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memiliki tugas sesuai dengan struktur dan tupoksi yang diatur salah satunya penerapan *e-government*.

Pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayang informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

- 1) Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon infomasi menyampaikan permohonan infomasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasaran seperti:
 - a. 4 kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 2 unit telepon
 - e. 2 lemari arsip
 - f. 1 filling cabnet
- 2) Portal/website Dinas Komunikasi dan Informatika Bulungan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://kominfo.bulungan.go.id/wp/>.
- 3) Portal/website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://ppidbulungan.com/>.
- 4) Aplikasi “Pantau Bulungan” dimana aplikasi ini merupakan pelayanan publik berbasis online yang telah di update dengan sebuah sistem terbaru dengan menggunakan metode 6 berita utama yang akan tampil dalam halaman utama.

Melalui website dan aplikasi tersebut, sangat membantu dan efektif. terlihat dari fungsinya yang telah mengakomodir pengajuan keberatan informasi untuk kemudian disampaikan kepada atasan PPID, hingga pengajuan sengketa informasi yang secara otomatis akan disambungkan dari sistem aplikasi Pantau Bulungan ke Bidang layanan sistem komunikasi dan informasi publik untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya di tindaklanjuti Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bukti kepedulian pemerintah dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk sarana dan prasarana termasuk egovernment. Sarana dan prasarana yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk fisik namun termasuk dalam jaringan

seperti internet dan server. Namun dalam pelaksanaan e-government tersebut pihak Diskominfo masih membutuhkan yang namanya server/ database.

3.1.3 Sosialisasi

Penyebaran informasi publik, tentu saja perlu sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari melakukan sosialisasi ini adalah sebagai sarana penyebarluasan atas informasi yang ingin disampaikan atau informasi yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Pihak Diskominfo sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Website dan Media sosial merupakan contoh penyebaran informasi publik secara *online*, sedangkan baleho dan majalah merupakan penyebaran informasi secara offline / tidak langsung.

Tabel 3.
Data Pelayanan Unit

No	Kecamatan	Unit Layanan		Keterangan
		Ada	Tidak ada	
1	Bunyu	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif
2	Peso	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif
3	Peso Hilir	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif
4	Sekatak	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif
5	Tanjung Palas	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online
6	Tanjung Palas Barat	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online
7	Tanjung Palas Timur	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online
8	Tanjung Palas Tengah	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online
9	Tanjung Palas Utara	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online
10	Tanjung Selor	<input type="checkbox"/>		leaflet/brosur, majalah regular, buku eksklusif, Online

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan

Sosialisasi pada umumnya sudah dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Bulunga, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dalam tabel ini dijelaskan bahwa semua daerah yang termasuk dalam

kabupaten bulungan sudah menerima yang namanya layanan informasi publik. Layanan informasi publik tersebut berupa brosur, majalah reguler, buku eksklusif, atau layanan informasi yang berupa online seperti website dan aplikasi. Seperti contoh gambar di bawah ini yang merupakan sosialisasi secara online tentang pelayanan vaksinasi covid 19 oleh Dinkes Kabupaten Bulungan **Gambar 4.1 Sosialisasi Secara Online**



Sumber : <http://diskominfo.bulungan.go.id/wp/>

3.2. Capacity

3.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai atau juga bisa disebut dengan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mensukseskan e-government dalam pelayanan informasi publik di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bulungan. Pegawai yang dimaksud merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan skill yang dibutuhkan dalam penerapan e-government tersebut. Namun fakta di lapangan yang terjadi , pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi masih di bilang cukup kurang.

Tabel 4.1 Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Dari table di atas dan beberapa data pendukung lainnya, peneliti menyimpulkan ,Kabupaten Bulungan masih membutuhkan yang namanya sumber daya manusia, namun perlu di garis bawahi yang di butuhkan merupakan sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat membantu dalam tupoksi Diskominfo Kabupaten Bulungan, termasuk dalam penerapan e-government sebagai pelayanan informasi publik. Jika hal ini sudah terwujud maka perlu namanya penempatan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena percuma saja sudah dapat pegawai yang tepat namun tidak digunakan dengan tepat.

3.2.2 Sumber daya keuangan

No.	Uraian	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1/ D IV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Kasi	-	2	3	1	-	-	-	-	6
	Kasubbag	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Sub Jumlah	-	4	6	1	-	1	-	-	12
2	Non Struktural	-	-	-	1	-	8	1	-	11
	Sub Jumlah	-	-	-	2	-	8	1	-	11
3	Honorer	-	-	4	-	-	5	-	-	9
	Sub Jumlah	-	-	4	-	-	5	-	-	9
Jumlah		-	4	10	3	-	14	1	-	32

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam bidang layanan informasi publik Kabupten Bulungan ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pemberian anggaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Anggaran dan Realisasi Kegiatan di Bidang Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bulungan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.502.809	16.458.906	99,73%
2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	190.000.000	187.170.000	98,51%
3	Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana jaringan dalam pelayanan informasi publik	244.780.000	282.096.815	98,90%
4	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	144.720.000	136.611.590	93,71%

5	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	49.124.600	44.540.000	90,67%
---	---	------------	------------	--------

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Diskominfo Kabupaten Bulungan 2020

Walaupun sudah ada program dan anggaran yang terpakai dalam pelaksanaan program Diskominfo tersebut, Pihak Diskominfo masih sangat membutuhkan yang namanya sumber daya keuangan. Namun karena terkendala keterbatasan anggaran, Diskominfo terpaksa untuk menahan ambisi untuk berkembang lebih lanjut, dan bertahan dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk program sehari-hari. Salah satu alasan anggaran itu berkurang karena Permen Keuangan Republik Indonesia tentang pengaturan anggaran dalam penanganan Covid-19

3.2.3 Infrastruktur Jaringan

Faktor lainnya yang mendukung mewujudkan e-government dalam pelayanan informasi publik yaitu sumber daya peralatan / Infrastruktur Suatu program tidak akan berjalan jika tidak memiliki alat untuk menjalankan program tersebut. Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini bisa dalam bentuk fisik atau non fisik.

Tabel 4. 3 Infrastruktur Jaringan Diskominfo Kabupaten Bulungan

Jaringan Internet dan LAN						
Memiliki Koneksi Internet	Total Bandwith Internet (Mbps)	Nama Provider Internet	Peforma Jaringan Internet Secara Umum	Memiliki Koneksi LAN	Peforma LAN secara Umum	Layanan wifi yang digunakan oleh masyarakat
Ya	20	Indihome (Telkom)	Lancar	Ya	Lancar	Ya

Sumber : LAKIP Diskominfo 2021

Tabel tersebut di jelaskan bahwa Diskominfo sudah memiliki koneksi internet yang menggunakan provider internet dari Indihome yang stabil di gunakan untuk 3-8 orang yaitu 20 Mbps, jika ingin di gunakan untuk lebih banyak orang, akan lebih baik di tingkatkan Bandwith internet tersebut. Peforma Koneksi LAN yang digunakan oleh Diskominfo termasuk golongan lancar, yang dimana Hardware hingga Software dapat terkoneksi dengan sinergi lewat jaringan lokal antar komputer. Namun masih terdapat beberapa daerah yang mengalami blank spot dikarenakan kondisi geografis yang tidak mendukung dan Faktor cuaca yang buruk, oleh sebab itu perlunya integrasi jaringan yang di dukung dengan penyediaan internet, BTS (Base Transceiver Station), dan Backbone Fiber yang menjadi tugas pihak Diskominfo.Kabupaten Bulungan.

3.3. Value

Pelaksanaan suatu ketentuan-ketentuan tidak terlepas dari kuantitas manfaat yang diperoleh. Dalam penerimaan besar tidaknya manfaat atau nilai yang diperoleh, tentu bukan pemerintah sendiri yang menentukan tapi juga masyarakat yang menikmati dan menerima hal tersebut. Kebijakan e-government tentunya memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku sebagai pelaksana. Oleh sebab itu pemerintah harus teliti dalam memilih dan menggunakan aplikasi apa dalam memeberikan manfaat kepada masyarakat

Penerapan e-government sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan, memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya website kabupaten dan aplikasi berbasis mobile, masyarakat dapat mengikuti dan update seputar tentang informasi pemerintahan dan lingkungan pemerintahan. Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran melalui website dan aplikasi pantau bulungan di kolom komentar / saran.

Masyarat sendiri sudah merasakan manfaat dari pelayanan informasi public yang di lakukan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Bulungan sehingga mengetahui perkembangan pemerintah secara transparasi dan akuntabel. Namun ada juga yang masih belum tau seputar aplikasi atau website layanan informasi public yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan, oleh sebab itu perlunya menyebar informasi seputar layanan informasi public yang dilakuakn oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan

Tidak hanya masyarakat saja yang mendapatkan manfaat namun pemerintah juga. Dengan pelayanan informasi publik secara online, pemerintah dapat lebih hemat biaya, hemat waktu, dan tenaga, sehingga dapat focus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari pelayanan tersebut. Pihak Diskominfo sudah memaksimalkan segala upaya untuk melakukan yang namnaya penyebaran inforamsi terhadap public. Namun kembali lagi kepada masyarakat menanggapi perkembangan yang telah diberikan oleh Diksominfo Kabupaten Bulungan.

3.4. Diskusi Temuan UtamNa Penelitian

Penerapan E-government di pemerintahan Indonesia itu sendiri dimulai dengan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang *e-government*. Pemerintah memerintahkan lembaga pemerintahan level nasional dan daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk menerapkan *e-government* (Intruksi Presiden,2003). Penerapapan *e-government* sekarang sudah memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Implementasi *e-government* dalam sehari-hari tidak berjalan dengan lancar, namun menemui beberapa hambatan.

Pelayanan informasi publik di Diskominfo masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari sumber daya manusia sampai sarana dan prasarana (Syamsiah Amali, 2016). Hasil penelitian sebelumnya juga selaras dengan yang terjadi di Diskominfo Kabupaten Bulungan. Diskominfo Kabupaten Bulungan masih membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan berkompeten sesuai dengan tupoksinya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Bulungan sudah mencukupi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun jika ada program kerja baru, pihak Diskominfo Kabupaten Bulungan harus menunda hal tersebut dikarenakan APBD yang sudah berkurang karena pengaturan dana bantuan focus *covid-19* yang dilakukan pemerintah keunangan.

Pengembangan e-government dalam penyediaan akses informasi ini, masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya keuangan dan kurangnya sosialisasi (Muhammad Alif, Hardi Warsono. 2019). Diskominfo Kabupaten Bulungan mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun, yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang harus di tunda, dan memanfaatkan anggaran seminim mungkin untuk menjalankan program yang baru. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengalihan dana dalam penanganannya *covid-19* sehingga APBD menjadi berkurang dari biasanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang ditunjukkan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa Penerapan e-government dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator support, Diskominfo Kabupaten Bulungan sudah mengaplikasikan e-government sebagai pelayanan informasi publik baik dari segi aturan yang mengatur, partisipasi dengan pemerintah dalam mengemban e-government, sampai dengan sosialisasi yang dilakukan Diskominfo dalam penyebaran informasi sebagai pelayanan informasi publik.
- 2) Indikator Capacity, Diskominfo Kabupaten Bulungan memiliki sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur jaringan yang belum optimal. Ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten ,dukungan anggaran yang membatasi pelaksanaan program serta kepedulian masyarakat yang masih rendah
- 3) Indikator Value, manfaat dalam pelayanan informasi publik baik secara offline maupun online yang dilakukan oleh Diskominfo sudah di laksanakan secara maksimum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah itu sendiri, begitu juga masyarakat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga tidak memiliki data terbaru dikarenakan dinas yang dituju belum memperbarui data yang di cari oleh peneliti

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi dengan teori e-government dari Indrajit, namun dengan menggunakan data yang lengkap dan akurat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Diskominfo Kabupaten Bulungan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga terhadap Dosen

pembimbing yang selalu membimbing hingga selesainya skripsi dan jurnal ini. Kepada teman-teman seperjuangan yang saling memotivasi dan memberikan bantuan baik fisik maupun batin penulis. Yang terpenting kepada Keluarga tercinta ,yang selalu merndukung apapun keputusan penulis dan mendoakan di tiap doanya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.Iqbal Fuadi, Aufarul Marom. "IMPLEMENTATION of E-GOVERNMENT THROUGHT to PUBLIK INFORMATION MEDIA WEB BASED AREA IN THE CITY of TEGAL." Publik Administration, The Faculty of social and political science, 2016.
- Adisasmita, Rahardjo. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Aditya Marcello Sumartono, Stefanus Sampe, Neni Kumayas. "OPTIMALISASI INFORMASI APLIKASI (SITASYA) SISTEM PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MANADO." Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2020: 1-12.
- Amali, Syamsiah. "KESIAPAN PPID DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DALAM." Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20 No.2, Desember 2016, 2016: 123-40.
- Budi Usmanto, Riswandha Immawan, Fauzi, Keni Puspita Sari, M. Isam Mahdi. "IMPLEMENTASI WEB MOBILE SEBAGAI MEDIA INFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PIRNGADI." Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS) – LPPM UNHAS, 2018: 32-39.
- Cresswell. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Creswell, John W. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publikations, 2014.
- Deddy Mulyadi, Hendrikus T. Gedeona, Muhammad Nur Afandi. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Deni Darmawan, Kunkun Nur Fauzi. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hardiansyah, Ahmad. "Peranana E-Government dalam mewujudkan Good Governance." 2011.
- Indrajit. Electronic Government. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- . Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Koswara, E. Dinamika Informasi Dalam Era Global. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mcluhan, Marshall. "Understanding Media : The Extensive of Man (Memahami Media : Yang Ekstensif Manusia)." McGraw-Hill International Journal, 1964.
- Misnawati, Heru Setiawan. "EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS APLIKASI PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB.TANJUNG JABUNG BARAT." Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2021: 50-68.
- Nurina Aprilia, S., Fefta Wijaya, A., Suryadi. "Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Sebagai Media E-Government dalam Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)." Wacana– Vol. 17, No. 2, 2014: 126-135.

Rakhmawati, Hermansyah, Fuqron. "Analisis Jenis Posting Media Sosial Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Likes dan Analisis Sentimental Masyarakat." *Jurnal Sosioteknologi* , 2018: 177-189.

Ratminto, Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Sanjaya, Wina. *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2008.

Satriya. "Pentingnya Revitalisasi e-Government." *Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, 2006: 38-43.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumadi, Suryabata. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Wardah, Mardhatilah. "PENGELOLAAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK PADA BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU." *JOM FISIP* Vol. 4 No. 1, 2017: 1-13.

Wargadinata, Ella. "HUBUNGAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PROGRAM SMART KAMPUNG KABUPATEN BAYUWANGI." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, n.d.

Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Bulungan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *KABUPATEN BULUNGAN DALAM ANGKA 2021*. Badan Pusat Statistics, 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

